



1.01 PENANAMAN MODAL

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Kemajuan perekonomian suatu daerah juga ditunjukkan dengan bergairahnya kondisi investasi di daerah tersebut. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan dibidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Namun adanya perubahan nomenklatur nama dinas sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan pelayanan administrasi perizinan. Pemberian tugas ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan perizinan dan non perizinan serta memberikan kepastian berusaha bagi investor.

Adapun sasaran dari pelaksanaan program pada urusan Penanaman Modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 2) Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan bagi masyarakat/dunia usaha dan meningkatkan kepuasan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat/pengusaha dalam pengurusan perizinan dan non perizinan melalui kegiatan sosialisasi sistem pelayanan perizinan yang efektif;
- 4) Memberikan inovasi/pengembangan dalam sektor Pelayanan Perizinan, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi;
- 5) Pengembangan media promosi yang lebih menarik dan inovatif dalam penanaman modal dan pelayanan perizinan;



- 6) Memperluas cakupan promosi penanaman modal;
- 7) Terpetakannya potensi investasi di Kabupaten Buleleng dengan adanya dokumen kajian sumberdaya yang terkait dengan investasi;
- 8) Memaksimalkan monitoring dan evaluasi penanaman modal terhadap investor di Kabupaten Buleleng;
- 9) Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- 10) Tersedianya data yang valid terkait dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 11) terselesaikannya permasalahan penanaman modal dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan dan non perizinan .

Untuk mewujudkan sasaran dalam urusan penanaman modal pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP melaksanakan 5 program yang terdiri dari 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan sesuai tabel berikut:

Penjabaran Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022

No.	Jumlah Program Kegiatan Sub Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)			(3)
1	Induk	Program	5	Rp. 9.659.595.000
		Kegiatan	9	
		Sub Kegiatan	29	
2	Perubahan	Program	5	Rp. 9.879.903.750
		Kegiatan	9	
		Sub Kegiatan	29	

A. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, alokasi anggaran sebesar Rp. 9.879.903.750, realisasi sebesar Rp. 9.177.278.963 atau 92,89 %. Dengan capaian keluaran (Output) mencapai 100 % yang dijabarkan melalui 5 Program, 9 Kegiatan dan 29 Sub kegiatan, sebagai berikut :

a) Program Penunjang (Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)

- 1) Program Penunjang pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten Buleleng terdiri dari 1 Program, 5 Kegiatan, dan 21 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.128.044.795,00 realisasi anggaran sebesar Rp



6.557.087.050,00 atau 91,99 %. Dengan Capaian 100 % , yang dijabarkan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp154.201.051,00 realisasi keuangan sebesar Rp151.268.744,00 atau 98,10%, dengan capaian 100% Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a) **Sub Kegiatan** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan* alokasi anggaran sebesar Rp85.119.142,00 realisasi Rp85.098.348,00 atau 99,98%. Dengan target 7 Dokumen, dengan realisasi (*output*) 7 Dokumen atau 100%.
- b) **Sub Kegiatan** Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD *dengan indikator Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi* alokasi anggaran sebesar Rp30.505.909,00 realisasi Rp30.396.396,00 atau 99,64%. Dengan target 3 laporan dengan realisasi (*output*) 3 laporan atau 100%.
- c) **Sub Kegiatan** Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *dengan indikator jumlah dokumen SAKIP* alokasi anggaran sebesar Rp38.576.000,00 Realisasi Rp35.774.000 atau 92,74%. Dengan target 10 Laporan,dengan realisasi (*output*) 10 Laporan atau 100%.

1.2 KegiatanAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp5.173.659.639,00 realisasi keuangan sebesar Rp 4.732.356.095,00 atau 91,47 %, dengan capaian 100% Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 4 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a) **Sub Kegiatan** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *dengan indikator Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan* alokasi anggaran sebesar Rp4.989.738.090,00 realisasi Rp4.548.905.673,00 atau 91,17 %. Dengan target 2 Dokumen,dengan realisasi (*output*) 2 Dokumen atau 100%.
- b) **Sub Kegiatan** Penyediaan administrasi pelaksanaan ASN *dengan indikator Jumlah Dokumen kepegawaian, RB dan Spip* alokasi anggaran sebesar Rp31.413.330,00 realisasi Rp31.289.586,00 atau 99,61%. Dengan target 2 Dokumen, dengan realisasi (*output*) 2 Dokumen atau 100%.



- c) **Sub Kegiatan** Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD *dengan indikator Jumlah Dokumen administrasi keuangan* alokasi anggaran sebesar Rp151.431.741,00 realisasi Rp151.431.566,00 atau 100%. Dengan target 3 Dokumen, dengan realisasi (*output*) 3 dokumen atau 100%.
- d) **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *dengan indikator Jumlah laporan keuangan akhir tahun* alokasi anggaran sebesar Rp1.076.478,00 realisasi Rp729.270,00 atau 67,75%. Dengan target 1 laporan, dengan realisasi (*output*) 1 laporan atau 100%.

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp682.115.753,00 realisasi keuangan sebesar Rp613.388.229 atau 89,92%, dengan capaian 100 %. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 5 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a) **Sub Kegiatan** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *dengan indikator Jumlah komponen instalasi listrik* alokasi anggaran sebesar Rp19.503.477,00 realisasi Rp17.555.538,00 atau 90,01%. Dengan target 8 jenis, dengan realisasi (*output*) 8 jenis atau 100%.
- b) **Sub Kegiatan** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *dengan indikator Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor* alokasi anggaran sebesar Rp375.222.599,00 realisasi Rp343.941.499,00 atau 91,66%. Dengan target 30 jenis, dengan realisasi (*output*) 30 jenis atau 100%.
- c) **Sub Kegiatan** Penyediaan Bahan logistik kantor *dengan indikator Jumlah sarana/prasarana upacara* alokasi anggaran sebesar Rp91.588.589,00 realisasi Rp77.299.400,00 atau 84,40%. Dengan target 8 jenis, dengan realisasi (*output*) 8 jenis atau 100%.
- d) **Sub Kegiatan** Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan *dengan indikator Jumlah barang cetak dan pengadaan* alokasi anggaran sebesar Rp29.279.913,00 realisasi Rp25.864.617,00 atau 88,34%. Dengan target 12 jenis, dengan realisasi (*output*) 12 jenis atau 100%.
- e) **Sub Kegiatan** Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan *dengan indikator Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan* alokasi anggaran sebesar Rp9.490.000,00



realisasi Rp9.360.000,00 atau 98,63%. Dengan target 36 rekening, dengan realisasi (*output*) 36 rekening atau 100%.

- f) **Sub Kegiatan** Fasilitasi Kunjungan Tamu *dengan indikator Jumlah jenis makanan dan minuman* alokasi anggaran sebesar Rp46.199.175,00 realisasi Rp44.889.175,00 atau 97,16%. Dengan target 8 jenis, dengan realisasi (*output*) 8 jenis atau 100%.
- g) **Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD *dengan indikator Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah* alokasi anggaran sebesar Rp110.832.000,00 realisasi Rp94.478.000,00 atau 85,24%. Dengan target 50 OH, dengan realisasi (*output*) 50 OH atau 100%.

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 747.106.663,00 realisasi keuangan sebesar Rp702.160.644 atau 93,98%, dengan capaian 100% Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 4 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a) **Sub Kegiatan** Penyediaan jasa surat menyurat *dengan indikator Jumlah surat terkirim* alokasi anggaran sebesar Rp71.415.410,00 realisasi Rp70.797.347,00 atau 99,13%. Dengan target 1.500 exemplar, dengan realisasi (*output*) 1.500 exemplar atau 100%.
- b) **Sub Kegiatan** Penyediaan jasa Komonikasi sumber daya air dan listrik *dengan indikator Jumlah rekening air, telepon dan listrik* alokasi anggaran sebesar Rp105.500.000,00 realisasi Rp92.167.495,00 atau 87,36%. Dengan target 84 Rekening, dengan realisasi (*output*) 84 Rekening atau 100%
- c) **Sub Kegiatan** Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor *dengan indikator Jumlah unit kendaraan* alokasi anggaran sebesar Rp192.000.000,00 realisasi Rp191.532.000,00 atau 99,76%. Dengan target 2 Unit, dengan realisasi (*output*) 2 Unit atau 100%
- d) **Sub Kegiatan** Penyediaan jasa pelayanan umum kantor *dengani ndikator alat kebersihan dan jumlah alat tulis kantor* alokasi anggaran sebesar Rp378.191.253,00 realisasi Rp347.663.802,00 atau 91,93%. Dengan target 85 jenis, dengan realisasi (*output*) 85 jenis atau 100%.

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp370.961.689,00 realisasi keuangan sebesar Rp357.913.338,00 atau



96,48%, dengan capaian 100%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a) **Sub Kegiatan** Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan *indikator Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai* alokasi anggaran sebesar Rp349.902.389,00 realisasi Rp336.961.755,00 atau 96,30%. Dengan target 21 Unit, dengan realisasi (*output*) 21 Unit atau 100%
- b) **Sub Kegiatan** Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya *dengan indikator Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik* alokasi anggaran sebesar Rp12.257.000,00 realisasi Rp12.156.276,00 atau 99,18%. Dengan target 6 Unit, dengan realisasi (*output*) 6 Unit atau 100%
- c) **Sub Kegiatan** Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya *dengan indikator Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik* alokasi anggaran sebesar Rp8.802.300,00 realisasi Rp8.795.307,00 atau 99,92%. Dengan target 14 unit, dengan realisasi (*output*) 14 unit atau 100%.

b) Program Utama (Program Prioritas/Unggulan yang dilaksanakan SKPD)

Sedangkan pada Program Utama pada Urusan Penanaman Modal terdiri dari 4 Program, 4 Kegiatan, dan 7 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.751.858.955,00 realisasi anggaran sebesar Rp2.620.191.913,00 atau 95,22%. Dengan Capaian 100%, yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Program** Promosi Penanaman Modal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp339.543.248,00 realisasi keuangan sebesar Rp323.407.210,00 atau 95,25%, dengan capaian 100%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp339.543.248,00 realisasi keuangan sebesar Rp 323.407.210,00 atau 95,25%, dengan capaian 100%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 2 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a) **Sub Kegiatan** Penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal *dengan indikator Jumlah dokumen strategi promosi Penanaman Modal* alokasi anggaran sebesar Rp111.471.360,00 realisasi Rp.108.653.402,00 atau 97,47%. Dengan target 1 Dokumen, dengan realisasi (*output*) 1 Dokumen atau 100%.



b) **Sub Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal dengan indikator *Jumlah Event pelaksanaan promosi yang dilaksanakan* alokasi anggaran sebesar Rp228.071.888,00 realisasi Rp214.753.808,00 atau 94,16%. Dengan target 2 Laporan, dengan realisasi (*output*) 2 laporan atau 100%.

2) **Program** Pelayanan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.130.102.846,00 realisasi keuangan sebesar Rp1.097.194.813,00 atau 97,09%, dengan capaian 100%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :

2.1 Kegiatan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.130.102.846,00 realisasi keuangan sebesar Rp1.097.194.813,00 atau 97,09%, dengan capaian 100% Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a) **Sub Kegiatan** Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan indikator *Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan* alokasi anggaran sebesar Rp736.106.975,00 realisasi Rp724.684.890,00 atau 98,45%. Dengan target) 7.036 ijin, dengan realisasi (*output*) 7.036 ijin atau 100%.

b) **Sub Kegiatan** Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan indikator *Jumlah izin dan non izin yang terbit* alokasi anggaran sebesar Rp245.165.267,00 realisasi Rp224.744.014,00 atau 91,67%. Dengan target 7.036 ijin, dengan realisasi (*output*) 7.036 ijin atau 100%.

c) **Sub Kegiatan** Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan dengan indikator *Jumlah dokumen evaluasi tingkat kepuasan masyarakat* alokasi anggaran sebesar Rp.148.830.604,00 realisasi Rp147.765.909,00 atau 99,28%. Dengan target 2 Laporan, dengan realisasi (*output*) 2 laporan atau 100%.

3) **Program** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.109.127.908,00 realisasi keuangan sebesar Rp1.027.293.314,00 atau 92,62%, dengan capaian 100%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut:



3.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.109.127.908,00 realisasi keuangan sebesar Rp1.027.293.314,00 atau 92,62%, dengan capaian 100% Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator *Jumlah dokumen* Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal alokasi anggaran sebesar Rp429.149.165,00 realisasi Rp375.773.332,00 atau 87,56%. Dengan target 4 Dokumen, dengan realisasi (*output*) 4 Dokumen atau 100%.

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator *Jumlah dokumen* pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal alokasi anggaran sebesar Rp679.978.743,00 realisasi Rp651.519.982,00 atau 95,81%. Dengan target 4 Dokumen, dengan realisasi (*output*) 4 Dokumen atau 100%.

4) Program Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal yang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp173.084.953,00 realisasi keuangan sebesar Rp172.296.576,00 atau 99,54%, dengan capaian 100%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut:

4.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp173.084.953,00 realisasi keuangan sebesar Rp172.296.576,00 atau 99,54%, dengan capaian 100% Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajiandan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan Pagu Anggaran sebesar Rp173.084.953,00 realisasi keuangan sebesar Rp172.296.576,00 atau 99,54%. Dengan target 1 Media informasi, dengan realisasi (*output*) 1 Media informasi atau 100%.

B. Permasalahan

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tahun 2022 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi selama tahun 2022. Beberapa permasalahan teknis yang terjadi adalah:



1. Efek dari Pandemi Covid-19 di tahun lalu masih mempengaruhi kondisi perekonomian sehingga kurangnya niat pelaku usaha untuk melakukan usaha
2. Ketidaksesuaian waktu penyelesaian izin sesuai yang tercantum pada SOP dan SP karena terkendala keterlambatan pemohon dalam melengkapi persyaratan Izin dan pembayaran retribusi.
3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha (badan usaha/perorangan) untuk mencari izin usahanya.
4. Adanya kendala migrasi data dari OSS Versi 1.1 ke OSS RBA sehingga LKPM tidak bisa dilaporkan terutama untuk usaha PMA karena harus memenuhi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) secara online.
5. Adanya pelaku usaha yang tidak memahami kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan Peraturan BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sehingga masih mengalami kendala terkait dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan yang mempengaruhi irrealisasi nilai investasi
6. Minimnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terhadap ketentuan terkait pendaftaran usaha melalui OSS (Online Single Submission) –RBA sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Ada empat Target Retribusi yang belum tercapai yaitu 1) Retribusi Ijin pengendalian menara telekomunikasi (28,45 %) hal ini disebabkan karena penetapan target tidak sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi, dimana jumlah pengawasan menara dalam 1 tahun hanya 2 kali. 2) Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (33,88%) dikarenakan regulasi perhitungan retribusi berubah sesuai dengan Perda tentang retribusi PBG sehingga retribusi untuk IMB yang sekarang namanya PBG tidak bisa tercapai. 3) Retribusi pemberian perpanjangan IMTA (6,04%) dikarenakan Perda baru ditetapkan bulan September 2022 sehingga Retribusi dana Konvensasi Penggunaan TKA sebagai pengesahan atas RPTKA Perpanjangan baru bisa dipungut, dan 4) Retribusi Izin Trayek (75,75 %) dikarenakan a. Saat ini masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik itu sepeda motor ataupun mobil pribadi, sehingga angkutan- angkutan yang masih beroperasi kurang diminati oleh masyarakat, b. Unit- unit mobil angkutan banyak yang berubah fungsi menjadi angkutan barang. Para supir beralih karena sepi penumpang mereka lebih memilih mengangkut barang, karena dirasa lebih menguntungkan mengangkut barang daripada mengangkut penumpang.



C. Upaya Mengatasi Permasalahan

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerjanya untuk tahun berikutnya antara lain:

1. Memastikan bahwa pelayanan perijinan dan non perijinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
 2. Tersedianya data potensi dan data eksisting perijinan dan non perijinan yang uptodate, valid dan terukur serta melakukan koordinasi dengan pihak desa untuk penyusunan data potensi desa.
 3. Melaksanakan pendampingan terhadap pelaku usaha yang belum paham Mendaftarkan Usahanya dalam system OSS-RBA
 4. Melakukan validasi data investasi secara maksimal, sehingga strategi promosi bias ditingkatkan dengan memperluas cakupan promosi dengan pengembangan media yang menarik dan mudah digunakan.
 5. Mengoptimalkan kegiatan rutin sosialisasi tentang perijinan dan non perijinan langsung di wilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada, melalui media elektronik, melalui brosur, pamflet ataupun media lainnya.
 6. Inovasi layanan yang mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan penerapan aplikasi SIAJAIB, Wilayah Blank Spot siCANTIK, Sitawa, Profil Investasi, OSS-RBA, dan LKPM Online.
 7. Monitoring dan peninjauan ke lapangan perlu ditingkatkan dan pembinaan serta arahan kepada pengusaha lebih diintensifkan sehingga pengusaha lebih paham mengenai kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan.
 8. Terhadap kondisi di atas DPMPTSP akan membentuk TIM Pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan melakukan pelayanan dengan pola Jemput Bola dilapangan.
 9. Terkait dengan OSS-RBA perlu adanya sosialisasi dan pendampingan yang lebih ditingkatkan serta dari sisi SDM juga dipersiapkan misalnya dengan mengikuti Bimtek atau pelatihan.
 10. Untuk perusahaan yang belum melunasi kewajibannya pada tahun 2022 sudah diberikan teguran pertama.
 11. Berkaitan dengan perolehan nilai terendah pada 3 unsur pelayanan tersebut, kemudian mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang riil, meliputi sarana dan prasarana (gedung kantor, alat kerja, dll), kompetensi personil dan implementasi ISO9001-2015, serta anggaran, maka akan dilakukan upaya perbaikan sebagai berikut:
 - a. Upaya perbaikan dari unsure Kualitas Sarana dan Prasana yaitu DPMPTSP
-



Kabupaten Buleleng berencana membentuk Mall Pelayanan Publik (MPP). Dan telah menganggarkan sarana perlengkapan pelayanan berbasis elektronik, yang di Anggarkan di Tahun 2023 (DPA DPMPTSP Tahun 2023)

- b. Upaya perbaikan dari unsur Persyaratan, yaitu melalui optimalisasi koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih memaksimalkan sosialisasi terkait kewajiban pengusaha dan calon pengusaha untuk memberikan Jaminan Sosial terhadap para pekerja (pegawai) dengan mengikut sertakan para pekerja (pegawai) dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Upaya perbaikan dari unsur Produk spesifik jenis pelayanan melalui sistem perizinan SiAjaib yaitu melalui penerapan kondisi berjenjang terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dengan solusi yang dilaksanakan tersebut diharapkan pelayanan kepada masyarakat terkait perizinan sebagaimana tugas dan kewenangan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat memaksimalkan tingkat kepuasan masyarakat yang lebih baik kepada semua pihak yang membutuhkan pelayanan kami.

D. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022 yaitu "**Meningkatnya Nilai Investasi**" yang dijabarkan melalui 2 Indikator kegiatan yaitu:

a. Nilai realisasi investasi

Target untuk nilai realisasi investasi tahun 2022 adalah Rp. 1.299.483.799.000, sedangkan untuk capaian realisasi investasi sampai dengan Tw IV sebesar Rp. 448.674.280.461 dan dapat disimpulkan bahwa untuk Tahun 2022 nilai realisasi investasi tidak mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain:

- Realisasi Investasi Tahun 2022 (Triwulan 1 s/d 4) tidak memenuhi target karena adanya perubahan penggunaan sistem LKPM online ke sistem OSS RBA, sehingga banyak pelaku usaha yang kurang memahami tentang proses pelaporan dan banyak pelaku usaha yang tidak mengirimkan laporan realisasi penanaman modal,
- Banyak pelaku usaha belum melakukan migrasi data pada OSS dari OSS versi 1.1 ke OSS versi OSS-RBA baik usaha PMDN maupun PMA sehingga Laporan Kegiatan Penanaman Modal tidak bisa dilakukan,
- Sering terjadinya trouble pada server pusat yang mengakibatkan terhambatnya pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan usahanya,



- Banyak pelaku usaha belum mengetahui kewajiban tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal baik laporan triwulan maupun semester,
- Untuk usaha mikro tidak diwajibkan untuk melaporkan LKPM sehingga nilai investasi kurang maksimal (tidak ada tambahan realisasi untuk usaha mikro).

b. Indeks kepuasan masyarakat

Target indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng adalah 81,50 Nilai. Pada semester I nilai yang diperoleh yaitu 82,02 nilai dan pada semester II nilainya 82,41. Jadi dapat disimpulkan untuk indikator indeks kepuasan masyarakat telah mencapai target.

E. Kebijakan Strategis Tahun 2022

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Merumuskan Kebijakan untuk Peningkatan Pelayanan dan Nilai Investasi	<p>-Peraturan Bupati Buleleng No. 21 Tahun 2022 tentang pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>-Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Status rancangan Perda saat ini sedang dalam Tahap pembahasan di DPRD Buleleng</p>	<p>- Peraturan Bupati ini untuk mengakomodir perizinan-perizinan yang tidak di proses melalui sistem OSS-RBA dan non perizinan yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah Kabupaten Buleleng</p> <p>- Untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Buleleng serta pelayanan berusaha yang berkualitas, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, dan diperlukan adanya penyesuaian kebijakan di daerah dengan berlakunya PP No. 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p>



F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Hasil Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang diselesaikan	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Di bidang Penanaman Modal perlu segera disiapkan Perda tentang pemberian fasilitas/insentif dalam upaya peningkatkan jumlah investor ke daerah	Sudah membuat naskah akademik pada Tahun 2018	Segera memasukkan ke lembaran daerah untuk lanjut adanya pembahasan terkait persiapan Perda pemberian fasilitas/insentif	DPMPTSP
2	Mall pelayanan publik perlu segera direalisasikan. Sementara belum dapat direalisasi, maka OPD teknis terkait agar menempatkan personilnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Proses pendirian mal pelayanan publik sampai saat ini sudah memasuki DED dan akan di bangun pada bulan Pebruari Tahun 2023.	Akan dikoordinasikan ke OPD Teknis dan Instansi Vertikal dengan mengacu pada FKP (Forum Komunikasi Publik) yang sudah dilaksanakan sehingga pelayanan perizinan menjadi satu pintu	DPMPTSP
3	Sosialisasi dan pendampingan perizinan kepada para pengembang perumahan dioptimalkan	Terkait dengan Penyelenggaraan dan Pengembangan Perumahan di Kabupaten Buleleng kami dari DPMPTSP secara Intens terus berkomunikasi dengan OPD Teknis Terkait (Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) untuk bisa bersinergi dalam menjalankan Amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta sekaligus memberikan Sosialisasi dan Kemudahan Perizinan kepada Para Pengembang Perumahan yang tergabung	DPMPTSP mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melaksanakan Rapat koordinasi terkait dengan Pembahasan Pengesahan Rencana Tapak. Dalam hal pembahasan ini menitik beratkan pada kemudahan dan kecepatan akan Pelayanan Perizinan kepada Pengembang Perumahan yang meliputi : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Rapat Pembahasan ini dilaksanakan pada Hari	DPMPTSP



		di dalam beberapa Asosiasi pengembang.	<p>Kamis, Tanggal 26 Januari 2023.</p> <p>2. Mengambil Inisiatif dengan mengundang Berbagai Asosiasi Pengembang yang ada di Kabupaten Buleleng, OPD Teknis terkait serta Instansi Vertikal (ATR/BPN) untuk diberikan Sosialisasi terkait Perizinan yang harus dan wajib dipenuhi beserta Mekanisme dan Prosedur yang sudah ditetapkan serta menyerah Aspirasi yang berkembang baik keluhan – keluhan yang dihadapi maupun kendala Teknis terkait Perizinan. Sosialisasi ini rencana akan diselenggarakan di Bulan Pebruari Tahun 2023 dan dilanjutkan secara berkesinambungan sesuai dengan keperluan dan Permasalahan kedepannya.</p> <p>3. Secara berkala tiap Tahunnya diadakan Pertemuan Sosialisasi terkait dengan Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha / Investor di Kabupaten Buleleng termasuk Pengembangan Perumahan yang dibiayai dengan dana DAK. Sosialisasi ini turut mengundang Narasumber yang ditunjuk oleh Kementerian Investasi / BKPM beserta Leading Sektor / OPD Terkait.</p>	
4	Bagi investasi yang akan dilaksanakan di	Kami DPMPTSP sangat mendukung akan	DPMPTSP yang sudah dimasukkan kedalam	DPMPTSP



<p>Kawasan/kecamatan yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang, maka pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Persetujuan KKPR) didasarkan pada rekomendasi Forum Tata Ruang.</p>	<p>Pengembangan dan berusaha menumbuhkan Investasi di Kabupaten Buleleng di berbagai Sektor Bidang Usaha terutama untuk UMKM. Terkait dengan UMKM dengan sector bidang usaha dengan tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, kami di DPMPTSP melaksanakan Prosedur dan Mekanisme Pengawasan terhadap pelaku usaha sesuai dengan amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko karena KKPR terbit secara otomatis melalui sistem OSS-RBA. Untuk Bidang Usaha dengan Sektor Usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi serta dengan Katagori Usaha Besar, Mekanisme KKPR dilaksanakan dengan / melalui Integrasi Sistem OSS-RBA dengan Gistaru dan melibatkan Forum Penataan Ruang untuk proses Penerbitan Rekomendasi KKPR.</p>	<p>keanggotaan Forum Penataan Ruang di Tahun 2023 tentunya akan berperan aktif didalam pembahasan dan pemberian masukan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan.</p>	
---	--	---	--

Singaraja, 26 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Buleleng



I Made Kuta, S.Sos

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700710 199203 1 007